

**NOTULENSI KELOMPOK 8**  
**PENDIDIKAN**  
**KEWARGANEGARAAN**

Hari/tanggal : Senin, 08 Mei 2023  
Waktu : 13.00-14.30  
Tempat : G-Meet  
Judul : DEMOKRASI DI INDONESIA

Pelaksana Presentasi/Diskusi

Penyaji : Aprita Fahria Zahra, Mita Yogi Handayani, Refiana  
Sari Moderator : Mita Yogi Handayani  
Notulis : Aprita Fahria  
Zahra Share screen : Refiana Sari  
Daftar Hadir : Mahasiswa PGSD Semester 2 Kelas H

Acara :

1. Pembukaan

Moderator mengkondisikan rekan-rekan mahasiswa lalu mempersilahkan penyaji untuk mempresentasikan materi DEMOKRASI DI INDONESIA serta menyampaikan materi.

2. Penyajian

Penyaji menyampaikan materi mengenai pengertian . Dilanjutkan penyampaian materi DEMOKRASI DI INDONESIA

3. Tanya Jawab

Dibuka 1 termin dengan 3 pertanyaan di setiap termin.

Pertanyaan Termin 1:

1. Bagaimana hubungan negara hukum demokrasi dan ham di Indonesia? (Asty Yulia Pratiwi)

Jawaban :

Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat totaliter ( tidak demokratis ), namun sebaliknya negara yang demokratis pastilah menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.

(Aprita Fahria Zahra 2213053259)

2. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji mengenai demokrasi di indonesia. Yang ingin saya tanyakan yaitu menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana upaya suatu negara dalam mewujudkan negara demokrasi yang membutuhkan kerja sama

antara pemerintah dengan rakyat? (Mutiar Putri)

Jawaban :

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, setelah Amerika Serikat, dan India. Meskipun pilar sistem demokrasi di negara ini telah dan terus berkembang dengan baik, namun hakikat demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di semua

tingkatan masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi sehingga kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemimpinnya semakin meningkat.

Untuk itu, kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural, seperti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintah dan parlemen. Pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi yang kita laksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.

(Aprita Fahria Zahra 2213053259)

3. Bagaimana kebebasan mengungkapkan pendapat di negara dengan demokrasi Pancasila saat ini? (Silmi Nur Afifah)

Jawaban:

Kebebasan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik di muka umum terhadap pemerintah ialah pilar penting dari demokrasi. Diberangusnya kebebasan berpendapat, berpikir, berserikat dan menyampaikan kritik di muka umum akan menyebabkan demokrasi berjalan pincang. Namun demikian, patut diingat bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal ala Barat yang mendewakan kebebasan absolut. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu dalam berpendapat, berserikat dan menyampaikan kritik di muka umum dibatasi oleh sejumlah hal. Antara lain, stabilitas dan keamanan nasional, kepentingan publik luas, ideologi bangsa serta etika dan aturan moral yang bersifat kemasyarakatan maupun keagamaan atau ketuhanan. Ini artinya, kebebasan masyarakat dalam berpendapat idealnya dipahami dalam koridor-koridor tersebut.

(Refiana Sari 2213053261)

## Termin 2:

4. Dari pemaparan kelompok 8 dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sedangkan pada saat ini masih ada masalah bahwa aspirasi yang disampaikan rakyat tidak di terima dengan baik oleh pemerintah, bagaimana solusi kalian untuk mengatasi masalah tersebut? (Shinta Dwi Kartika)

Jawaban:

Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil seperti:

1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah

Pemerintah harus memastikan bahwa mereka secara terbuka dan jujur menginformasikan publik tentang kebijakan dan keputusan mereka.

2) Meningkatkan partisipasi publik

Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan pendapat mereka dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

3) Membangun dialog yang terbuka dan konstruktif

Pemerintah harus membuka saluran komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan

menempatkan diri mereka dalam posisi untuk mendengarkan dan merespons aspirasi publik.

4) Meningkatkan akses ke keadilan

Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat memiliki akses ke sistem peradilan yang adil dan independen.

5) Meningkatkan partisipasi sipil

Masyarakat sipil harus diberdayakan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan pemerintah bertanggung jawab.

(Mita Yogi Handayani 2213053107)

5. Demokrasi Pancasila adalah cerminan dari kepribadian bangsa. Bagaimana jika demokrasi tersebut tidak di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, langkah apa yang harus di ambil untuk mengatasi hal tersebut? (Nisa Azzukhrufi)

Jawaban:

Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Prinsip demokrasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara: Sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Melindungi Hak Asasi Manusia. Memberikan kebebasan berpendapat di muka umum.  
(Mit Yogi Handayani 2213053107)

6. Dalam sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila Terdapat demokrasi dengan Rule of law Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual

Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah Tanpa rule of law, suatu pemerintahan berisiko disfungsi Salah satu perwujudan rule of law di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan Namun pada kenyataannya terdapat banyak tindakan pejabat yang mengambil keputusan secara individu demi kepentingan pribadi yang tidak memihak pada rakyat dan banyak terjadi disfungsi pada pemerintahan di Indonesia, terutama dalam anggaran Menurut kelompok penyaji mungkinkah Indonesia dapat benar-benar menerapkan prinsip Rule of law tanpa disfungsi Jika memang bisa bagaimanakah cara membuat pemerintahan di Indonesia bisa benar-benar menerapkan prinsip Rule of law, dan di mulai dari manakah hal tersebut di terapkan (Adelia Shintia Ningrum)

Jawaban:

Sebelum menjawab pertanyaan adel, kita harus tau bagaimana sih penting nya rule of law dalam sebuah negara.

Mengapa rule of law penting untuk melahirkan negara kesejahteraan? Karena rule of law tidak hanya menjamin dan melindungi hak rakyat atas pekerjaan, hak usaha, dan hidup layak. Rule of law juga menjamin perlindungan hukum atas properti, modal usaha dan kepastian

hukum investasi. Secara garis besarnya adalah Rule of law sangat penting untuk melahirkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab rule of law membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi korup. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan fungsi-fungsinya, khususnya hak, kemampuan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

Nah Menurut pendapat kelompok kami, Indonesia Tidak akan mungkin menerapkan secara utuh prinsip dari rule of law tsb, krna faktor utama adalah kualitas dari sumber daya manusia Indonesia sendiri yg sangat tidak mendukung adanya prinsip tsb.

Contoh nya, seperti pemaparan pertanyaan dari rekan Adel. Hal tsb sudah mencerminkan bagaimana kualitas SDM Indonesia yg sangat minim.

(Refiana Sari 2213053261)

4. Kesimpulan dibacakan oleh moderator.